

ANALISIS KEBIJAKAN PROGRAM KARTU INDONESIA PINTAR KULIAH (KIP-K) DALAM MENDUKUNG PENCAPAIAN SDGS 4 DI UNIVERSTAS NEGERI SURABAYA

Ayunda Putri Athamevia¹, Ivena Callista Putri², Firre An Suprpto³, Indah Prabawati⁴

1), 2), 3), 4) Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu
Politik, Universitas Negeri Surabaya

Email: 25040674120@mhs.unesa.ac.id, 25040674109@mhs.unesa.ac.id,
firresuprpto@unesa.ac.id, indahprabawati@unesa.ac.id.

Abstrak

Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) merupakan bantuan pendidikan dari pemerintah bagi mahasiswa berprestasi yang berasal dari keluarga kurang mampu. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi pelaksanaan program KIP-K di Universitas Negeri Surabaya (UNESA). Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan analisis menggunakan enam indikator evaluasi William N. Dunn, yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan program KIP-K di UNESA telah berjalan cukup baik melalui proses seleksi dan survei lapangan untuk memastikan kelayakan penerima. Namun masih terdapat kendala seperti keterbatasan sumber daya pengelola, kurangnya transparansi informasi, serta keterlambatan pencairan dana. Oleh karena itu diperlukan peningkatan koordinasi dan sistem informasi agar program berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.

Kata kunci: KIP-K, evaluasi program, bantuan pendidikan.

Abstract

The Indonesia Smart Card for Higher Education (KIP-K) program is a government scholarship aimed at supporting academically capable students from economically disadvantaged families. This study evaluates the implementation of the KIP-K program at Universitas Negeri Surabaya (UNESA) using a descriptive qualitative method. The evaluation is based on six indicators from William N. Dunn: effectiveness, efficiency, adequacy, equity, responsiveness, and accuracy. The results indicate that the program has been implemented fairly well through verification and field survey processes. However, several challenges remain, including limited administrative resources, lack of information transparency, and delays in fund disbursement. Improvements in coordination and information systems are needed to ensure the program operates more effectively and accurately.

Keywords: KIP-K program, policy evaluation, educational assistance

Pendahuluan

Pendidikan merupakan salah satu faktor penting dalam pembangunan sosial serta peningkatan kualitas sumber daya manusia. Melalui pendidikan, masyarakat dapat meningkatkan mobilitas sosial dan memutus rantai kemiskinan. Secara filosofis, pendidikan adalah perwujudan dari nilai-nilai humanisme yang menempatkan pengembangan potensi manusia sebagai prioritas tertinggi. Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2020 yang berbicara mengenai Program Indonesia Pintar (PIP) diperuntukkan bagi mahasiswa yang dinyatakan telah lolos secara resmi di Perguruan Tinggi termasuk penyandang disabilitas dengan prioritas target mahasiswa yang memiliki KIP, mahasiswa yang berasal dari kalangan atau keluarga miskin/ rentan miskin dan/atau dengan pertimbangan khusus, mahasiswa afirmasi (papua dan papua barat serta 3T dan TKI) serta mahasiswa terkena bencana, konflik sosial atau kondisi khusus. Selain itu, pemerintah dan pemerintah daerah juga berkewajiban menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi seluruh warga negara tanpa diskriminasi. Pada kenyataannya, tidak semua masyarakat Indonesia dapat mengakses pendidikan, terutama pada jenjang pendidikan tinggi.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2022, jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 26,36 juta orang. Kondisi ini menyebabkan sebagian masyarakat mengalami keterbatasan dalam membiayai pendidikan sehingga kesempatan untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi menjadi terbatas. Angka kemiskinan yang masif ini berimplikasi pada rendahnya Angka Partisipasi Kasar (APK) perguruan tinggi di kalangan kelompok ekonomi terbawah. Tanpa intervensi negara, pendidikan tinggi berisiko menjadi barang mewah yang eksklusif, yang pada gilirannya akan memperlebar jurang kesenjangan sosial di masa depan. Hal ini bertolak belakang dengan target Sustainable Development Goals (SDGs) poin ke-4, yaitu menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua pada tahun 2030. (Badan Pusat Statistik, 2023)

Sebagai upaya meningkatkan akses pendidikan tinggi bagi masyarakat kurang mampu, pemerintah meluncurkan Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) yang merupakan bagian dari Program Indonesia Pintar (PIP) dan sebagai evolusi dari program Bidikmisi. Program ini memberikan bantuan biaya pendidikan serta biaya hidup bagi mahasiswa dari keluarga miskin atau rentan miskin. Secara konseptual, KIP- K adalah manifestasi dari kebijakan publik yang inklusif dan humanis, di mana negara hadir untuk memberikan kepastian masa depan bagi warga negaranya. Sebagai bukti komitmen terhadap perluasan akses pendidikan, pemerintah pada tahun 2024 mengalokasikan anggaran sebesar Rp13,9 triliun untuk mendukung lebih dari 985.000 mahasiswa di seluruh Indonesia. Skema bantuan ini dirancang dengan sangat holistik, mencakup pembebasan biaya kuliah (Uang Kuliah Tunggal) yang dibayarkan langsung

ke perguruan tinggi, penyediaan bantuan biaya hidup bulanan yang disesuaikan dengan indeks harga lokal, hingga pembebasan biaya seleksi masuk perguruan tinggi bagi calon penerima yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Kebijakan ini merupakan bentuk nyata hadirnya negara dalam menjamin keberlangsungan studi bagi mahasiswa, termasuk bagi penyandang disabilitas dan mereka yang berasal dari daerah terdepan, terluar, atau tertinggal (3T). Pelaksanaan program KIP-K ini berada di bawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dan diimplementasikan melalui berbagai perguruan tinggi, salah satunya Universitas Negeri Surabaya (UNESA). Dalam pelaksanaannya, proses seleksi penerima KIPK dilakukan melalui beberapa tahapan seperti verifikasi data, survei lapangan, serta verifikasi virtual untuk memastikan kelayakan calon penerima dan tahapan krusial untuk meminimalisir risiko salah sasaran (*inclusion error*).

Meskipun instrumen regulasi seperti Persesjen Kemendikbudristek Nomor 10 Tahun 2022 telah memberikan panduan teknis yang rigid, fakta di lapangan menunjukkan bahwa implementasi kebijakan seringkali bersifat kompleks dan penuh tantangan birokratis. Dalam praktiknya masih ditemukan beberapa permasalahan, seperti indikasi ketidaktepatan sasaran penerima bantuan serta keterlambatan pencairan biaya hidup mahasiswa. Permasalahan tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan yang dirancang dengan implementasi di lapangan. Diperlukan sebuah perspektif kolaboratif yang melibatkan sinergi antara pemerintah, akademisi, masyarakat, dan media yang dikenal sebagai model kolaborasi pentahelix untuk menciptakan ekosistem pendidikan yang lebih akuntabel. Evaluasi kebijakan menggunakan indikator William N. Dunn menjadi sangat relevan untuk membedah sejauh mana efektivitas, efisiensi, dan pemerataan program ini telah tercapai di UNESA.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam dan komprehensif mengenai implementasi kebijakan program KIP-K di Universitas Negeri Surabaya dalam kerangka mendukung pencapaian SDGs 4. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat teridentifikasi berbagai hambatan struktural maupun teknis, serta dirumuskan rekomendasi kebijakan yang berbasis data (*evidence-based policy*) untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan bagi mahasiswa kurang mampu di masa mendatang. Oleh karena itu, diperlukan analisis terhadap formulasi dan implementasi kebijakan Program KIP-K untuk mengetahui kendala yang terjadi serta upaya perbaikan agar program dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.

Tinjauan Pustaka

Implementasi kebijakan menurut George C. Edward III

Tahap penting dalam proses kebijakan publik karena menentukan apakah kebijakan yang telah dirumuskan dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Dalam penelitian ini, implementasi program KIP-K di Universitas Negeri Surabaya

(UNESA) dianalisis menggunakan model George C. Edward III (1980), keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat faktor utama:

Faktor	Penjelasan Singkat	Analisis KIP-K UNESA
Komunikasi	Proses penyampaian kebijakan dari pembuat ke pelaksana agar tidak terjadi kesalahpahaman	Kejelasan transmisi informasi pendaftaran dan persyaratan dari pusat ke mahasiswa
Sumber Daya	Ketersediaan sarana pendukung untuk menjalankan kebijakan	Kecukupan staf verifikator, infrastruktur, IT, dan anggaran operasional kampus
Disposisi	Sikap, komitmen, dan kemauan pelaksana dalam menjalankan kebijakan	Integritas dan komitmen para pelaksana kebijakan (staf/dosen) dalam verifikasi data
Struktur Birokrasi	Mekanisme data dan tata organisme yang mengatur pelaksanaan kebijakan.	Efektifitas SOP dan koordinasi antara unit kerja untuk mencegah fragmentasi tugas

Evaluasi Kebijakan (Indikator William N. Dunn)

Indikator (Dunn)	Analisis dalam penelitian
Efektifitas	Mengukur capaian pendidikan bagi kelompok sasaran
efisiensi	Rasio antara prosedur birokrasi dengan ketepatan waktu pencairan
Kecukupan	Kesesuaian bantuan dengan biaya hidup rill di Surabaya
pemerataan	Keadilan distribusi bantuan (termasuk bagi penyandang disabilitas)
responsivitas	Kesempatan layanan kampus dalam merespon kendala mahasiswa
ketepatan	Ketepatan sasaran penerima

Untuk mengukur kinerja kebijakan secara komprehensif, penelitian ini menggunakan enam kriteria evaluasi dari William N. Dunn (2018). Penggunaan enam kriteria ini memastikan bahwa evaluasi tidak hanya berhenti pada aspek capaian kuantitatif, tetapi juga menyentuh aspek kualitas dan keadilan sosial.

Collaborative Governance dan Model pentahelix

Persoalan pendidikan tinggi yang kompleks menuntut pendekatan kolaboratif yang tidak bisa dilakukan secara satu pihak. Penelitian ini mengadopsi model pentahelix yang dikembangkan dari konsep Collaborative Governance oleh Ansell dan Gash (2008), di mana keberhasilan kebijakan KIP-K sangat bergantung pada sinergi antar aktor.

Dalam ekosistem ini, Pemerintah memegang peran sebagai regulator dan penyedia anggaran utama, sementara Universitas Negeri Surabaya (UNESA) selaku pihak Akademisi berperan sebagai operator teknis sekaligus verifikator di lapangan. Sinergi ini diperluas dengan melibatkan Dunia Usaha sebagai mitra strategis dalam pengembangan kompetensi dan penyerapan lulusan. Pada sisi hilir, Masyarakat—yang mencakup mahasiswa dan orang tua—berperan sebagai penerima manfaat sekaligus garda terdepan dalam pengawasan sosial. Seluruh kolaborasi tersebut didukung oleh peran Media sebagai kanal transparansi informasi, yang berfungsi untuk menjaga akuntabilitas publik selama proses implementasi program berlangsung.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan desain evaluatif. Metode ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk memahami dan menggambarkan secara mendalam pelaksanaan kebijakan Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) di Universitas Negeri Surabaya. Pendekatan kualitatif digunakan untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai kondisi di lapangan, khususnya terkait proses pelaksanaan dan evaluasi program. Desain evaluatif diterapkan agar peneliti dapat menilai kinerja program KIP-K secara komprehensif, dengan mengintegrasikan kriteria evaluasi kebijakan menurut William N. Dunn yakni efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan sebagai pisau analisis utama.

1. Fokus penelitian ini diarahkan pada tiga aspek krusial:

analisis proses implementasi yang membedah variabel komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi (George C. Edward III) analisis hasil kebijakan berdasarkan kriteria evaluasi (William N. Dunn); serta analisis kolaboratif menggunakan model pentahelix untuk memetakan sinergi antara pemerintah, akademisi, dunia usaha, masyarakat, dan media dalam ekosistem KIP-K.

Untuk memperkaya analisis, penelitian ini juga mengintegrasikan data deskriptif persepsi mahasiswa mengenai efektivitas dan responsivitas layanan KIP-K, yang berfungsi sebagai bukti empiris pendukung terhadap temuan kualitatif.

2. Teknik analisis data

Dilakukan dengan menggunakan model interaktif dari Miles dan Huberman yang berlangsung secara siklikal. Tahap pertama adalah reduksi data, di mana peneliti mengklasifikasikan data mentah dari wawancara dan dokumen, lalu menyaringnya sesuai dengan variabel implementasi dan kriteria evaluasi. Tahap kedua adalah penyajian data, di mana hasil wawancara disusun dalam narasi deskriptif, sementara data persepsi mahasiswa diolah secara statistik deskriptif sederhana untuk melihat tren kepuasan. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi, di mana peneliti mengintegrasikan hasil deskriptif dengan temuan kualitatif untuk memberikan jawaban komprehensif atas rumusan masalah penelitian. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dan observasi terhadap pihak yang terlibat dalam pengelolaan program KIP-K di Universitas Negeri Surabaya. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari dokumen resmi, peraturan terkait program KIP-K, serta berbagai sumber literatur yang relevan dengan penelitian.

Hasil dan Pembahasan

1. Analisis

Tahun / Jalur	Total Mahasiswa diterima	Penerima KIP-K	Keterangan
2026 (SNBP)	6.509 mahasiswa	1.293 mahasiswa	Data resmi hasil seleksi
2025 (SNBT)	8.813 mahasiswa	3.252 mahasiswa	Unesa peringkat 1 nasional penerima KIPK-k
Pertahun (estimasi pendaftar)	4.000-5.000 pendaftar	±1.500 diterima	Berdasarkan proses seleksi

Implementasi program KIP-K di berbagai perguruan tinggi, termasuk di Universitas Negeri Surabaya, menunjukkan hasil yang cukup signifikan dalam mendukung pemerataan pendidikan. Berdasarkan data terbaru, pada tahun 2026 terdapat 1.293 mahasiswa baru Unesa yang dinyatakan lolos sebagai penerima KIP-K dari total 6.509 mahasiswa yang diterima melalui jalur SNBP. Hal ini menunjukkan bahwa

program tersebut benar-benar memberikan akses nyata bagi mahasiswa dari keluarga kurang mampu untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi. Jika dilihat lebih jauh, proporsi penerima bantuan di Unesa tergolong cukup tinggi. Kondisi ini mencerminkan komitmen institusi dalam mendukung kebijakan pemerataan pendidikan tinggi serta memperluas partisipasi kelompok ekonomi prasejahtera. Selain itu, program KIP-K tidak hanya mencakup pembebasan atau subsidi biaya pendidikan (UKT), tetapi juga bantuan biaya hidup yang diberikan secara berkala, mahasiswa dapat menjalani perkuliahan dengan lebih stabil secara finansial, dan Menjamin keberlangsungan studi Mahasiswa yang berasal dari daerah terdepan, terluar, atau tertinggal, dan menempuh studi pada Perguruan Tinggi wilayah yang terkena dampak bencana alam atau konflik sosial. Dengan demikian, KIPK-K tidak berfungsi sebagai instrumen bantuan finansial, tetapi juga sebagai kebijakan afirmatif yang mampu menjangkau kelompok rentan secara lebih luas dan inklusif.

Di balik capaian statistik tersebut, implementasi di lapangan menunjukkan dinamika yang jauh lebih kompleks. Berdasarkan observasi langsung yang dilakukan, proses verifikasi terhadap 1.293 mahasiswa tersebut bukanlah sekadar pemenuhan administratif, melainkan sebuah filter ketat untuk memastikan integritas sasaran. Dalam perspektif implementasi Edward III, UNESA telah melakukan adaptasi prosedural yang signifikan melalui integrasi sistem perbankan dengan Bank BTN, di mana pembuatan rekening mahasiswa dilakukan secara otomatis untuk meminimalisir fragmentasi birokrasi. Hasil wawancara mendalam dengan staf pengelola beasiswa mengonfirmasi bahwa alur birokrasi yang kini terdigitalisasi telah mempercepat distribusi dana, membuktikan bahwa kesiapan infrastruktur di tingkat lokal menjadi variabel penentu keberhasilan implementasi di lapangan.

Evaluasi kinerja program jika ditinjau melalui kriteria William N. Dunn memberikan gambaran komprehensif mengenai efektivitas kebijakan. Dari aspek efektivitas, program ini berhasil meningkatkan aksesibilitas pendidikan bagi kelompok rentan, yang terindikasi dari partisipasi aktif penerima beasiswa dalam kegiatan akademik dan organisasi. Terkait ketepatan sasaran, syarat IPK minimal yang diberlakukan menjadi instrumen kendali mutu yang memastikan bantuan diberikan kepada mahasiswa yang berkomitmen tinggi. Dalam aspek kecukupan, bantuan biaya hidup secara nominal telah memenuhi standar kebutuhan dasar, namun analisis terhadap efisiensi menunjukkan bahwa tingkat keberhasilan penggunaan dana sangat bergantung pada literasi keuangan masing-masing individu. Mahasiswa dengan literasi keuangan yang baik mampu mengalokasikan bantuan secara efisien, sementara mereka dengan literasi rendah sering menghadapi kendala pengelolaan biaya hidup bulanan. Responsivitas program juga terlihat dari hadirnya pendampingan sosial yang cepat, melengkapi sistem birokrasi kampus yang terkadang bersifat kaku.

Pendekatan kolaboratif melalui model Pentahelix juga tampak nyata melalui peran FORMADIKSI sebagai penyangga sosial. Peneliti mengamati bahwa FORMADIKSI

menjembatani celah komunikasi antara birokrasi kampus dan mahasiswa. Dalam sesi wawancara, informan mengungkapkan bahwa organisasi ini tidak hanya membantu urusan administratif, tetapi juga menjadi tempat bagi mahasiswa untuk berbagi kendala akademik dan ekonomi di awal semester. Sinergi ini mengonfirmasi bahwa pendekatan kolaboratif telah beroperasi secara organik di UNESA, di mana unsur akademisi dan mahasiswa saling mengisi ruang yang tidak mampu dijangkau oleh sistem administratif semata. Fenomena ini sekaligus menunjukkan bahwa program KIP-K telah bertransformasi menjadi investasi modal manusia yang krusial, di mana keberhasilannya tidak sekadar diukur dari angka pencairan dana, melainkan dari peningkatan daya serap lulusan di masa depan.

Sebagai refleksi kritis, peneliti menemukan adanya paradoks kontrol kinerja, di mana tekanan akademik melalui syarat IPK yang ketat terkadang berbenturan dengan realitas ekonomi mahasiswa yang menuntut mereka bekerja sambil. Hal ini menegaskan bahwa pendampingan perlu diperluas agar tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga suportif secara psikososial. Ke depan, keberhasilan program ini di UNESA harus terus dijaga melalui penguatan ekosistem pendukung yang lebih proaktif.

Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) di Universitas Negeri Surabaya (UNESA) telah berjalan secara efektif dan transformatif dalam mendukung pencapaian SDGs 4 (Pendidikan Berkualitas). Keberhasilan ini dibuktikan dengan posisi UNESA sebagai peringkat pertama nasional penerima KIP-K pada tahun 2025, yang menegaskan komitmen institusi terhadap inklusivitas dan perluasan akses bagi kelompok prasejahtera.

Ditinjau dari perspektif George C. Edward III, kesuksesan ini didorong oleh adaptasi struktur birokrasi yang matang melalui digitalisasi perbankan (Bank BTN) dan pola komunikasi yang organik. Sementara itu, evaluasi menggunakan indikator William N. Dunn menunjukkan bahwa meskipun aspek efektivitas, kecukupan, dan pemerataan telah terpenuhi dengan baik, masih terdapat celah pada aspek efisiensi dan responsivitas. Hal ini dipicu oleh rendahnya literasi keuangan mahasiswa serta adanya "paradoks kontrol kinerja," di mana tuntutan standar IPK yang tinggi sering kali berbenturan dengan realitas ekonomi mahasiswa. Namun, hadirnya FORMADIKSI sebagai elemen *Pentahelix* terbukti mampu menjadi penyangga sosial (*social buffer*) yang menjembatani hambatan komunikasi antara birokrasi kampus dan mahasiswa. Secara keseluruhan, KIP-K di UNESA telah berevolusi dari sekadar bantuan finansial menjadi instrumen investasi modal manusia yang berkelanjutan.

Daftar Pustaka

- Republik Indonesia. (2012). *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi*. Jakarta, Indonesia: Sekretariat Negara.
- Sekretariat Jenderal Kemendikbudristek. (2022). *Peraturan Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek Nomor 10 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Indonesia Pintar Pendidikan Tinggi*. Jakarta, Indonesia: Kemendikbudristek.
- Dunn, W.N. (2012). *Public Policy Analysis: An Integrated Approach* (5th ed.). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781315663012>
- Subarsono, A. G. (2011). *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori, dan Aplikasi*. Pustaka Pelajar. (Referensi utama dalam konteks Indonesia).
- Nugroho, R. (2017). *Public Policy: Teori, Manajemen, Dinamika, Analisis, Konvergensi, dan Kimia Kebijakan*. Elex Media Komputindo.
- Wahab, Solichin Abdul. (2012). *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Bumi Aksara.
- Edwards III, G. C. (1980). *Implementing Public Policy*. Congressional Quarterly Press. (Referensi wajib untuk model implementasi).
- Ansell, C., & Gash, A. (2008). *Collaborative Governance in Theory and Practice*. (Referensi utama untuk model Pentahelix/Kolaborasi).
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. Sage Publications. (Referensi utama untuk metodologi penelitian kualitatif).
- Larasati, A. D., Dinda, D., Aidah, N. A., Gustiputri, R., & Isyak, S. N. R. (2022). Analisis kebijakan program beasiswa kartu indonesia pintar-kuliah (KIP-K) di Universitas Diponegoro. *Jurnal Ilmu Administrasi dan Studi Kebijakan (JIASK)*, 5(1).
- Fauzi, A., & Nisa, K. (2021). Implementasi kebijakan bantuan biaya pendidikan KIP-Kuliah di perguruan tinggi negeri: Perspektif George C. Edward III. *Jurnal Administrasi Publik*, 12(1), 88-102.
- Sari, D. P., & Utami, T. (2024). Aksesibilitas pendidikan tinggi bagi kelompok marjinal: Studi pencapaian SDGs 4 melalui program KIP-K. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 9(1), 15-30.
- Wibowo, A., & Santoso, B. (2023). Model kolaborasi pentahelix dalam manajemen beasiswa perguruan tinggi berbasis inklusivitas sosial. *Jurnal Manajemen Publik*, 8(3), 301-318.